

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA**

**Aldian Prestya<sup>1)</sup>, David Adechandra Ashedica Pesudo<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>FEB/Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: 232018136@student.uksw.edu

<sup>2</sup>Staf Pengajar FEB/Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: [david.pesudo@uksw.edu](mailto:david.pesudo@uksw.edu)

**Abstract**

*The purpose of this study was to examine the effect of apparatus, village government organizational commitment, and community participation on village fund accountability. This study uses mixed methods by combining two forms of research approaches, namely quantitative and qualitative. The population is village officials and village communities in Truko Village, Bringin District, Semarang Regency. The sampling technique used the slovin formula by distributing 24 questionnaire questions to 50 village communities and conducting interviews with the Village Head, Village Treasurer, and PLT Desa as village apparatus representatives to support statistical findings. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires through direct surveys. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis with SPSS application. The results showed that the competence of the village fund apparatus, village government organizational commitment, and community participation had a positive and significant effect on fund accountability.*

**Keywords :** *Village Fund Apparatus Competence, Village Government Organizational Commitment, Community Participation, and Village Fund Accountability.*

**1. PENDAHULUAN**

Akuntansi Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, keuangan daerah, maupun keuangan desa (Wida *et al.*, 2017). Desentralisasi merupakan wewenang pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah akibat adanya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan, sehingga pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah pusat (Kumalasari dan Riharjo, 2016). Sesuai dengan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan keuangan dan akuntabilitas dana untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Wida *et al.*, 2017).

Pemerintah pusat menggunakan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat serta membantu pelaksanaan otonomi daerah Mada *et al.*, (2017) sehingga pemerataan pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat direalisasikan dengan memberikan dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Dana desa yang dialokasikan pada tahun 2017 di Jawa Tengah merupakan dana desa yang paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia yakni sebesar Rp 6,3 triliun. Besarnya dana desa yang diberikan ke sejumlah desa di Jawa Tengah berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan anggaran. Hal ini terlihat dari ditemukannya sejumlah indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan aparat

dana desa setempat (Purba, 2017). Dari data yang dikumpulkan, terdapat kurang lebih 11 kasus yang terindikasi adanya penyimpangan dana desa, diantaranya yakni penyimpangan dana desa yang dilakukan Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dan Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal yang keduanya terindikasi melakukan penyimpangan dana desa periode 2015-2016.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Umam selaku Sekretaris Desa Truko, menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana di Desa Truko masih belum optimal, dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Sikap responsif dari aparat desa untuk menangani permasalahan tersebut juga dinilai kurang karena latar belakang kemampuan aparat desa. Selain itu partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi penggerak pengelolaan dana desa bersifat fluktuatif atau pasang surut sehingga menyebabkan pengelolaan dana desa Truko turut terpengaruhi. Adanya permasalahan tersebut merupakan hal yang patut untuk diulik lebih mendalam mengenai praktik kompetensi akuntabilitas, kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat desa di desa Truko

Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 berisi bahwa pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rismawati (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat desa setempat. *Accountability framework* digunakan sebagai alat untuk menginvestigasi secara komprehensif dalam melihat faktor individu dan sistem yang diterapkan pada sebuah pemerintahan yang menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas (Nurkhasanah, 2019).

Pengelolaan dana desa yang akuntabel serta memenuhi aspek tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dapat meningkatkan kinerja aparat desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa (Irma, 2015). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kompetensi aparat desa. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan,

kemampuan pada konteks manajemen sumber daya manusia (Mualifu *et al.*, 2019).

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas di desa dapat berjalan dengan maksimal (Nurkhasanah, 2019). Kompetensi sumber daya aparat desa merupakan komponen penting dalam suatu aktivitas pemerintahan, karena dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa harus memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan (Tarjo, 2019).

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang kedua adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Menurut Murcia dan Sanchez (2013) komitmen organisasi merupakan sikap kesiapan suatu individu yang berada di sebuah organisasi pemerintah yang memiliki tujuan, sasaran organisasi dan budaya untuk mencapai kelangsungan organisasi pemerintah. Komitmen organisasi menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah desa dapat mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi (Nurkhasanah, 2019). Komitmen organisasi dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa, karena komitmen berasal dari individu yang menjalankan tugas, sehingga memberikan tindakan positif bagi organisasi (Setyowati, 2021). Dengan meningkatkan komitmen organisasi kepala desa dan perangkat desa, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana desa sehingga akan meningkatkan kinerja aparat desa (Fitriana, 2015).

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan serta pengembangan masyarakat pedesaan (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Partisipasi masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan adanya potensi yang ada di masyarakat untuk melakukan pemilihan serta pengambilan keputusan mengenai solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada (Nurkhasanah, 2019). Pengelolaan Dana Desa membutuhkan peran dari partisipasi masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan dalam mengawasi penggunaan dana desa yang diperoleh dari pemerintahan pusat agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah

terhadap dana desa tersebut (Cahyani & Suardika, 2020).

Sejalan dengan penelitian Gagali (2019), Nurdin dan Wijaya (2019), dan Setyowati (2021) membuktikan bahwa kompetensi aparatur dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Berbeda dengan penelitian Alminanda dan Marfuah (2018) serta Khasanah (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Selanjutnya penelitian Cahyani dan Suardika (2020), Kartika (2012), Mustanir *et al.*, (2018), dan Permatasari *et al.*, (2021) menilai bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Nurdin dan Wijaya (2019), Setyowati (2021), dan Tarjo (2019) yang menguji pengaruh kompetensi aparatur dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas dana desa. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengindikasikan adanya perbedaan hasil akibat pemilihan metode yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda, rata-rata menggunakan studi komparatif kualitatif berbasis pendekatan dari sisi pemerintah. Penggunaan pendekatan dari sisi pemerintah dirasa kurang memberikan transparansi mengingat masyarakat merupakan pemegang kedaulatan yang dapat memberikan partisipasinya terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian yang akan dilakukan kali ini akan menggabungkan perspektif pemerintah dengan perspektif masyarakat mengenai akuntabilitas dana desa dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena pertimbangan yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) tentang sifat umum penelitian kuantitatif, antara lain: (a) kejelasan unsur: tujuan, subjek, sumber data sudah mantap, dan rinci sejak awal, (b) dapat menggunakan sampel, (c) kejelasan desain.

Penggunaan *mix method* berupa data statistik dan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lengkap. Disisi lain penelitian yang menggabungkan variabel partisipasi masyarakat cukup jarang ditemui dan dalam penelitian ini partisipasi masyarakat akan disandingkan dengan

variabel kompetensi aparatur dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa sebagai variabel independen. Pemilihan partisipasi masyarakat desa dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat desa turut serta mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, serta menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah desa (Latif *et al.*, 2019). Penelitian ini memilih objek di Desa Truko karena sejauh ini serapan di Desa Truko terbilang cukup baik, dapat dilihat dari pemanfaatan dana desa disetiap tahunnya yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa maupun BUMDES yang ada di Desa Truko.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa masih banyak masalah yang masih terjadi terkait akuntabilitas dana desa. melalui hasil wawancara yang dilakukan pada *pre-evaluation* masih ditemukan beberapa kasus yang menyebabkan akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa kurang optimal. Sehingga penelitian ini layak dilakukan untuk mengrtahui pengaruh kompetensi aparatur dana desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Dari latar belakang masalah yang ada dapat disimpulkan persoalan penelitian yang pertama, apakah kompetensi aparatur dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa? kedua, apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa? terakhir, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menguji adanya pengaruh kompetensi aparatur dana desa terhadap akuntabilitas dana desa, untuk menguji pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas dana desa, dan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan serta menjadi sumber refrensi peran pemerintah desa bagi masyarakat dengan memberikan bukti empiris mengenai kompetensi aparatur dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana di Desa Truko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat dijadikan tinjauan nyata untuk mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*. Serta bagi pemerintah desa di Desa Truko, Kecamatan Bringin,

Kabupaten Semarang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi implikasi akuntabilitas dana desa terhadap pemerintah desa dengan melihat kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, serta partisipasi masyarakat desa sebagai referensi pegawai maupun pihak yang ada di dalam pemerintah desa. Dan bagi para akademisi maupun penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan masukan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi berhubungan dengan akuntabilitas dana desa pada masa yang akan datang.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam mengambil keputusan kepada *agent* tersebut. Teori agensi berasumsi jika dalam tiap diri individu terdapat motivasi sehingga menimbulkan benturan atau konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi menempatkan Kepala Desa sebagai *agent* sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai *principal* yang mana dalam kondisi ini masyarakat berspekulasi jika pemerintah desa tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kepentingan masyarakat. Pada teori keagenan dalam pelaksanaan dana desa dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 (Nurkhasanah, 2019).

Dalam organisasi sektor publik, teori keagenan digunakan sebagai alat untuk melihat apakah pemerintah desa dapat menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat dengan baik (Sari *et al.*, 2020). Masalah agensi timbul karena adanya asimetri informasi antara Kepala Desa yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan masyarakat (Nurkhasanah, 2019). Adanya masalah agensi, memungkinkan terjadinya permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Akuntabilitas Dana Desa

Yesinia *et al.*, 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban Kepala Desa dalam hal menyediakan tanggung jawab, mengungkapkan, serta melaporkan semua kegiatan atas keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan misi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya melalui media yang dilaksanakan secara periodik. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat desa (Dewi dan Gayatri, 2019). Pemerintah desa memiliki peran dalam mempertanggungjawabkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai penjamin atas kaidah efisiensi, efektivitas, serta reliabilitas dalam laporan keuangan desa yang memuat mengenai kegiatan dari proses *planning* hingga proses *realization* atau pelaksanaannya (Rismawati, 2019). Mada *et al.*, (2017) menyatakan bahwa masyarakat haus akan data atau pertanggung jawaban terkait segala aktivitas pemerintahan mulai dari sumber daya yang masuk hingga sumber daya yang dikeluarkan.

### Kompetensi Aparat Dana Desa

Masruhin dan Kaukab (2019) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dipertahankan dan dilakukan oleh seseorang pada periode waktu periode tertentu. Kompetensi yang dilakukan oleh pengelola dana desa menjadi salah satu syarat penting agar akuntabilitas dana desa bisa berjalan dengan lancar. Adanya prinsip desentralisasi menyebabkan implementasi praktik pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan sejumlah dana kepada pemerintah daerah melalui adanya anggaran atau perencanaan. Dalam perencanaan Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting (Widyatama *et al.*, 2017).

Agar pembangunan desa menjadi optimal, bidang pengetahuan, keterampilan dan kecerdasan harus dimiliki bagi setiap aparat desa atau yang biasa disebut menjadi kompetensi. Selain memiliki kompetensi yang mumpuni, suatu tindakan nyata diperlukan dalam proses pembangunan desa. Kesesuaian bidang pengetahuan yang dimiliki dengan pekerjaan merupakan syarat yang krusial yang dipertimbangkan masyarakat (Dewi dan Gayatri, 2019).

### Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Nurkhasanah (2019) pada penelitiannya menjelaskan bahwa dorongan dalam diri atau

motivasi yang ada dalam diri untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan sendiri disebut komitmen organisasi. Komitmen organisasi direfleksikan sebagai sebuah upaya yang ada dalam diri seseorang secara kuat memberikan pengaruh atau melibatkan diri dengan kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasi mempunyai keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam organisasi dan bersedia bekerja keras untuk pencapaian tujuan organisasi (Rismawati, 2019).

Adanya Komitmen organisasi pada fungsi internal pemerintah desa yang tinggi dapat berkontribusi untuk mempersuasi aparat pemerintah desa agar bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di samping itu, adanya komitmen yang tinggi juga berpengaruh terhadap motivasi individu untuk lebih mementingkan organisasi dibanding dengan kepentingan pribadi serta meningkatkan usaha untuk memperbaiki organisasi sesuai dengan apa yang di inginkan (Nurkhasanah, 2019). Komitmen akan mendorong individu untuk percaya diri dan semangat kerja sehingga terjadi perubahan menuju arah yang semakin positif. Adanya peningkatan kualitas psikologi dari hasil kerja merupakan tanda-tanda dari adanya rasa senang saat menjalankan tugas pada diri tiap individu (Suherwan dan Kamaliah, 2018).

#### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat di definisikan sebagai proses ikut sertanya seseorang dalam memecahkan dan mengelola masalah yang ada di sekitar masyarakat. merupakan masyarakat. Upaya *problem solving* yang dilakukan masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat merupakan satu-kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama yakni menangani dan mengevaluasi setiap fenomena perubahan yang ada di sekelilingnya (Muslimin *et al.*, 2012).

Proses partisipasi masyarakat tidak sebatas dalam proses pembuatan keputusan dalam perencanaan program kerja. Partisipasi masyarakat lebih ke arah identifikasi masalah dan potensi masalah yang akan timbul. Gagalnya pembangunan di desa biasanya di pelopori karena kurangnya partisipasi masyarakat (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Masyarakat dalam lingkup ini diposisikan sebagai para pemangku kepentingan yang krusial dimana dalam setiap pelaksanaan program kerja terutama pembangunan desa, pemerintah desa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat karena pembangunan desa di prioritaskan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa harus berjalan efisien, efektif dan tepat sasaran (Wafirotin dan Septiviastuti, 2019).

#### **Pengaruh Kompetensi Aparat Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Sarah *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparat dana desa berpengaruh positif, dimana semakin kompeten aparat pengelola dan desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Penelitian tersebut sejalan dengan Agustiniingsih *et al.*, (2020), Aulia, (2018), Dewi dan Gayatri, (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam bidangnya maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan serta masyarakat terhadap dana desa. Kompetensi yang dimiliki dari perangkat desa akan meningkatkan akuntabilitas yang akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya. Semakin kompeten seseorang aparatur desa, maka hasil laporan keuangan yang disusun akan semakin baik pula akuntabilitasnya. Penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Kompetensi aparat dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

#### **Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Suherwan dan Kamaliah, (2017), Raharjo *et al.*, (2017), Sarah *et al.*, (2020) menyatakan jika komitmen organisasi tergolong sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Akuntabilitas dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi memiliki rasa kepuasan dan keterlibatan dalam bekerja untuk mencapai tujuan di organisasi. Kemudian penelitian Nurdin dan Wijaya, (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang yang mengidentifikasikan keterlibatannya dalam satu bagian organisasi. Komitmen organisasi dibangun atas kepercayaan pekerjaan atas nilai-nilai organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Semakin komitmen anggota organisasi, maka anggota organisasi akan semakin baik dalam melakukan pelayanan dan administrasi desa. sehingga rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

**H2:** Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Hasil penelitian sebelumnya Pratiwi dan Dewi, (2021) Dewi dan Gayatri (2019) memperoleh

hasil jika partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif untuk mendukung adanya pembangunan desa, dana desa yang sifatnya sensitif membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai penengah. Masyarakat sebagai bagian dari fungsi pemerintahan turut mendukung berhasilnya penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa melalui partisipasinya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sarah *et al*, (2020) yang mendapati hasil jika partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap dana desa. Hasil penelitian lain milik Atiningsih dan Ningtyas (2019) mendapati hasil yang sama di mana pelayanan publik yang baik merupakan ciri adanya pengelolaan dana desa yang baik oleh aparat desa. Masyarakat yang turut serta dalam aktivitas pengelolaan dana desa akan mendapatkan informasi yang relevan seputar penyaluran dana desanya. Pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran adalah harapan dari adanya pengelolaan dana desa yang baik dan partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kenaikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga rumusan hipotesis dapat disusun sebagai berikut:

**H3:** Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

**Kerangka Penelitian**

Gambar 1. Kerangka Penelitian

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mix method* dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan penelitian yakni kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian untuk memahami permasalahan penelitian (Creswell, 2013). Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan *software* SPSS 25.

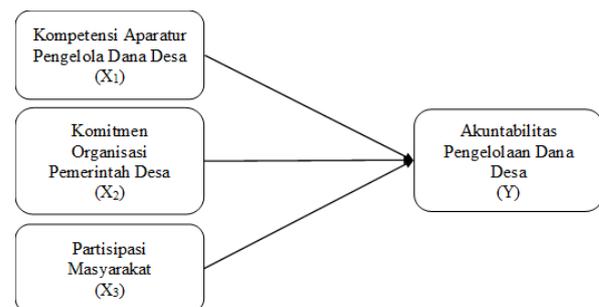
**2.2 Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui responden. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model *sequential explanatory design*. Metode penelitian dengan model tersebut akan bercirikan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada

tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik survey menggunakan angket, sehingga data kuantitatif akan diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Truko sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan PLT Desa sebagai informan untuk menjelaskan hasil dari data yang telah didapatkan melalui hasil kuesioner yang dilakukan pada tahap pertama. Penelitian ini mengembangkan metode survey secara langsung agar hasil yang diperoleh lebih efektif untuk mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar

**2.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa di Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang representatif dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan



dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel diambil secara tidak acak menggunakan pertimbangan khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, masyarakat desa yang sudah tinggal di Desa Truko kurang lebih lima tahun terakhir. Kedua, tingkat pendidikan minimal SMA/ SLTA sederajat. Penentuan jumlah sampel diukur menggunakan metode *slovin* untuk menghitung ukuran sampel. Jumlah partisipasi masyarakat desa di Desa Truko sebanyak 30 orang. Berikut merupakan perhitungan sampling dengan metode *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi  
 E : Batas Toleransi Kesalahan (5%)

Perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{50}{1 + 50 (0,05)^2} = \frac{50}{1 + 0,125} = \frac{50}{1,125}$$

$$= 44,44 \text{ (dibulatkan ke atas menjadi 44)}$$

partisipasi masyarakat sedangkan untuk variabel dependennya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel yang ada akan diukur menggunakan *skala likert* dengan rentang nilai 1-5, 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (kurang setuju), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju).

**2.4 Definisi Operasional Variabel**

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa (KOPD), dan

**Tabel 1. Definisi Vriabel, Indikator, dan Skala Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran Indikator
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa merupakan hal yang dibutuhkan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan, serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Mada <i>et al.</i> , 2017)	1. Pengetahuan ( <i>knowledge</i> ) 2. Keterampilan ( <i>skill</i> ) 3. Sikap ( <i>attitude</i> )	Skala <i>likert</i> dengan rentang nilai 1-5 , dimana angka 1 = Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Kurang Setuju, 4= Setuju dan 5 = Sangat Setuju
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (KOPD)	Komitmen Organisasi adalah Orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, dimana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan di pemerintahan desa (Suherwan & Kamaliah, 2018).	1. Afektif 2. Keberlanjutan 3. Normatif	
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi merupakan keikutsertaan individu yang secara sadar dalam kegiatan tersebut maupun kondisi tertentu yang terjadi antara individu dengan individu lain maupun individu dengan kelompok dengan berbagai cara untuk berbagi informasi (Aulia, 2018)	1. Pengambilan keputusan 2. Penyusunan anggaran 3. Pelaksanaan anggaran	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah proses pengelolaan dana yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggung jawaban yang dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan (Daulay, 2021).	1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan	

**2.5 Tahapan Penelitian**

Tahap pertama, penelitian ini akan menggunakan metode statistik deskriptif dimana metode ini merupakan pengolahan data dan proses tabulasi menjadi data yang mudah dipahami dan interpretasikan. Metode analisis deskriptif

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data dengan memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dari rata-rata, standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*.

Tahap kedua, untuk mengukur kevalidan data, penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis uji, yang pertama adalah uji validitas. Uji

Validitas dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah kuesioner telah disusun secara valid atau sah, sehingga perlu diuji dengan uji korelasi antara nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen sehingga untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang sebagai instrumen. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan tabel *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ . Kedua, uji reliabilitas yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran ini relatif konsisten apabila diulangi lebih dari 2 kali. Reliabilitas dapat dijadikan alat ukur yang dapat dipercaya dan diandalkan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. *Alpha Cronbach* digunakan untuk skala interval yang dapat mengidentifikasi apabila relasi memiliki nilai yang tinggi, maka instrumen penelitian juga memiliki reliabilitas yang tinggi pada internal konsistensi. Jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Jenis uji yang ketiga adalah uji asumsi klasik dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menguji, dan memastikan bahwa di dalam model regresi data yang digunakan tidak terdapat normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *jarque-bera*  $p > 0,05$  maka data berdistribusi normal. uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji korelasi antara variabel bebas atau independen, apabila hasil dari matrix menunjukkan korelasi  $< 80$  maka tidak terdapat multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi kesamaan varian nilai residual pada setiap pengamatan menggunakan uji *glejser*.

Tahap ketiga, untuk menganalisis data akan digunakan teknik analisis regresi linier berganda dimana pengujian regresi berganda dilakukan dengan penerapan uji persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi berganda memiliki hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk menunjukkan arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
X<sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa  
X<sub>2</sub> : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa  
X<sub>3</sub> : Partisipasi Masyarakat  
a : Bilangan Konstanta  
B : Bilangan Koefisien  
e : Error yang ditolerir

Tahap keempat, penelitian ini akan menguji hipotesis menggunakan pengujian statistik  $t$  atau uji signifikansi parsial. Uji statistik  $t$  digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji  $t$  bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Apabila *Sig t* lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima, demikian pula sebaliknya *Sig t* lebih besar dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak. Bila H<sub>0</sub> diterima berarti memiliki hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tahap kelima, setelah menyebarkan kuesioner dan mendapatkan jawaban, maka hasilnya akan dianalisis untuk mengetahui total jawaban yang telah diberikan. Total dari persentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Truko. Dari hasil tanggapan responden atas kuesioner yang dibagikan, penelitian ini akan menggunakan skala *likert* dan interval dengan skala untuk mengetahui jawaban responden terhadap setiap instrumen indikator.

Tahap keenam, wawancara dengan perwakilan Desa yang akan dilakukan dengan membuat 24 daftar pertanyaan, dimana nantinya setiap butir pertanyaan akan ditanyakan kepada narasumber yang diwawancarai yakni Kepala Desa, Bendahara Desa, dan PLT Desa. Wawancara akan dilakukan dengan bantuan alat perekam sebagai bahan untuk melakukan *cross check* apabila pada saat analisa terdapat data, keterangan, ataupun informasi yang tidak sempat dicatat.

Tahap ketujuh, triangulasi dalam penelitian ini akan digunakan sebagai uji kredibilitas data untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Triangulasi dapat

dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kuantitatif akan digunakan metode survey dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat desa untuk memperoleh data mengenai kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas yang ada di desa. Sedangkan penelitian kualitatif akan digunakan metode wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa, Bendahara Desa, dan PLT Desa untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal serta gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

Tahap terakhir, akan dilakukan penarikan kesimpulan hasil analisis kuesioner dan wawancara untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Profil Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 masyarakat desa yang berada di di Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui profil dari 50 responden, dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Profil Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	23	0,46%
Perempuan	27	0,54 %
Total	50	100%

Usia	Jumlah	Presentase
20 Tahun	6	0,12%
21-35 Tahun	23	0,46%
36-50 Tahun	12	0,24%
>50 Tahun	9	0,18%
Total	50	100%

Sumber: Data Primer (2022)

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari responden adalah perempuan dengan persentase 0.54% dan persentase laki-laki sebesar 0.46%. Sedangkan usia dari responden terdiri dari responden yang berusia 20 tahun sebesar 0.12%, 21 tahun sampai 35 tahun sebesar 0.46%, 36 tahun sampai 50 tahun sebesar 0.24% dan usia lebih dari 50 tahun sebesar 0.18%.

##### 3.2 Statistika Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistika Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Mi n	Max	Mean	Std. Dev.
---------------------	---	---------	-----	------	--------------

Kompetensi	50	14	30	23,52	4,678
Komitmen	50	12	30	22,70	5,258
Partisipasi	50	12	30	22,10	5,442
Akuntabilitas	50	10	30	20,78	5,783
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Olah data SPSS (2022)

Tabel di atas menjelaskan bahwa sampel penelitian ini sebanyak 50 sampel. Jika dilihat dari variabel akuntabilitas menunjukkan nilai terendah sebesar 10, nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,78 yang artinya kurang dari nilai rata-rata sebesar 20,78 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai-nilainya merata. Berdasarkan variabel independen yaitu kompetensi, komitmen dan partisipasi memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi sehingga dapat dikatakan penyimpangan data yang terjadi adalah rendah maka penyebaran nilainya merata.

##### 3.3 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas dapat diperoleh hasil *pearson correlation* atau *r* hitung masing-masing indikator dari variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat desa lebih besar dari nilai *r* tabel yaitu 0,279 yang artinya bahwa data valid. Jika dilihat dari nilai alpha baik variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat desa memiliki nilai yang lebih besar dari 0,600 yang artinya bahwa data reliabel.

##### 3.4 Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Kompetensi	Komitmen	Partisipasi
Uji Normalitas (Kolmogoro v Smirnov)	0,093 (Data Berdistribusi Normal)	0,093 (Data Berdistribusi Normal)	0,093 (Data Berdistribusi Normal)
Uji Multikolinearitas (VIF < 10)	Tidak Terdapat Multikolinearitas	Tidak Terdapat Multikolinearitas	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser Sig > 0,05)	Semua Signifikan	Semua Signifikan	Semua Signifikan

Model Regresi linier berganda dapat dikatakan sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi Klasik. Dari

tabel diatas dapat diketahui hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut rincian lengkap atas hasil dari masing masing uji asumsi Klasik.

**3.5 Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil uji normalitas atau *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,093 nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan berdistribusi normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)

Berdasarkan output grafik normal *Probability Plot (P Plot)* diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dna mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

**3.6 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi, komitmen, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi	0,563	1,776
Komitmen	0,617	1,620
Partisipasi	0,769	1,300

Sumber: Olah data SPSS (2022)

Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan beberapa cara salah satunya melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen. Tabel tersebut menjelaskan bahwa model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas karena memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar dari 0,10.

**3.7 Uji Heteroskedasitas**

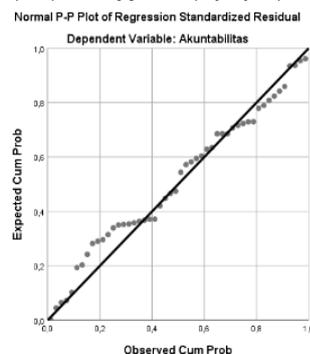
Untuk menguji pengaruh kompetensi, komitmen, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.
Kompetensi	,624
Komitmen	,737
Partisipasi	,621

Sumber: Olah data SPSS (2022)

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinieritas. sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik



penelitian ini adalah analisis regresi linier untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear**

Variabel Penelitian	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
Kompetensi	,344	2,967	,005
Komitmen	,410	3,697	,001
Partisipasi	,225	2,260	,029

Sumber: Olah data SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier, yaitu:

$$Y = -4,763 + 0,344 + 0,410 + 0,225$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -4,763 menyatakan bahwa jika variabel dianggap konstan, maka rata-rata nilai akuntabilitas sebesar -4,763. Kemudian persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel diantaranya, koefisien regresi kompetensi (x1) sebesar 0,344 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan nilai variabel kompetensi meningkatkan besaran nilai akuntabilitas sebesar 0,344, koefisien regresi komitmen (x2) sebesar 0,410 menyatakan bahwa setiap penambahan satu

satuan nilai variabel kompetensi meningkatkan besaran nilai akuntabilitas sebesar 0,410, dan koefisien regresi partisipasi (x3) sebesar 0,225 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan nilai variabel kompetensi meningkatkan besaran nilai akuntabilitas sebesar 0,225.

**Uji Signifikansi Variabel Bebas (Uji t)**

Uji *t* ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji *t* digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai *t* hitung masing-masing koefisien regresi dengan *t* tabel atau nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

**Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Variabel Bebas (Uji t)**

Hipotesis	Variabel Independen	T Value	Sig	Hasil Hipotesis
H1	Kompetensi	2,967	0,005	Didukung
H2	Komitmen	3,697	0,001	Didukung
H3	Partisipasi	2,260	0,029	Didukung

Adapun hasil analisis uji *t* pada penelitian ini adalah seperti berikut:

**Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas**

Dari Tabel Hasil uji regresi *Coefficient* dapat diketahui nilai signifikan untuk kompetensi yakni 0,005 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan beta bernilai negatif 0,426. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

**Pengaruh komitmen terhadap Akuntabilitas**

Dari Tabel Hasil uji regresi *Coefficient* dapat diketahui nilai signifikan untuk komitmen yakni 0,001 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan beta bernilai negatif 0,451. Sehingga dapat dinyatakan bahwa komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

**Pengaruh partisipasi terhadap Akuntabilitas**

Dari Tabel Hasil uji regresi *Coefficient* dapat diketahui nilai signifikan untuk partisipasi yakni 0,029 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan beta bernilai negatif 0,240. Sehingga dapat dinyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

**Temuan Wawancara**

Berdasarkan kegiatan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak aparat desa yaitu narasumber 1 selaku Kepala Desa, narasumber 2 selaku Bendahara, dan narasumber 3 selaku PLT (staf pembantu teknis), maka diperoleh hasil wawancara yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

**Akuntabilitas**

Dari hasil wawancara mengenai akuntabilitas desa, menurut narasumber 1 selaku Kades mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab internal telah diberikan kepada setiap anggota sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa diketahui bahwa proses tersebut turut melibatkan unsur bendahara desa. Seperti yang diungkapkan oleh pihak Kades sebagai berikut:

*“Iya, selama ini akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan membuat laporan keuangan secara rutin yakni setiap 1 tahun sekali. Bendahara juga sudah membuat laporan pertanggung jawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan dengan mencatat setiap anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.”*

Narasumber 1 selaku Kades pun mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa telah disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat. Penyampaian ini berupa publikasi pada apbdes, dimana bentuknya seperti spanduk atau baliho yang ditempel pada titik titik area tertentu. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai akuntabilitas desa dengan pihak Bendahara yakni narasumber 2 mengatakan bahwa proses atau tahap pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara berikut:

*“Pertama dari musrenbang kemudian diskusi terus menentukan jumlah dan, setelah itu masuk ke rekening desa nah rekening desa yang mengambil itu Kades dan Bendahara desa, lalu setelah diambil dikasihkan pada tugas pokok masing masing, untuk pembangunan dan diserahkan kepada tugas pokok bangunan, untuk pemerintah ke pemerintahan, pokoknya dari masing tugas pokok masing-masing, jadi Bendahara tinggal menyalurkan dari pengambilan uang.”*

Narasumber 2 juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa terdapat peran aparat yaitu seperti penyerahan data kepada TPK (tim pelaksana kegiatan) kemudian saat sudah

selesai akan ada permintaan data bukti pembayaran dari masing masing toko pembeliannya yang selanjutnya akan langsung dipotong pajak sehingga pajak nya selalu dibayar sesuai pembelian yang telah dilakukan. Selanjutnya dalam pertanyaan yang disampaikan peneliti mengenai “Apakah dalam mengelola keuangan juga melibatkan unsur masyarakat?” narasumber 2 memberikan jawaban yang selaras dengan narasumber 1 selaku Kades yaitu masyarakat juga ikut terlibat dalam mengelola dana desa.

*“Otomatis kita rembukan dulu, seperti BPD juga control BPK serta control pak kades. Karna sebagai pemegang tim pelaksana kegiatan jadi saya mengambil uang langsung dan saya berikan sesuai dengan pengambilannya. Tapi itu kan tidak semua diambil jadi bertahap juga kira kira bangunan itu memerlukan berapa diambil sekian dulu kalau udah selesai baru dilakukan pengajuan lagi berupa permohonan pencairan untuk dikasihkan kepada BPK nya kembali itupun harus ada berita acaranya juga.” Ungkap narasumber 2.*

Dan terakhir dari hasil wawancara dengan narasumber 3 yang menjabat sebagai pembantu teknis diketahui bahwa terkait informasi mengenai kebijakan pemerintahan tentang pengelolaan dana pihak pemerintah akan selalu menyajikan data penganggaran dari awal tahun sampai pelaporan akhir tahun kepada masyarakat.

#### **Komitmen**

Dari hasil wawancara mengenai komitmen, menurut narasumber 1 selaku Kades mengatakan bahwa dalam hal pemahaman siklus akuntansi maka pihak yang lebih memahami adalah pihak Bendahara. Selain itu dari narasumber 1 juga diperoleh informasi yaitu rata-rata pendidikan terakhir para aparatur desa adalah pendidikan SMA dengan tingkat pemahaman tugas yang diberikan yakni sebesar 80%.

Narasumber 1 pun mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa terdapat pencatatan atau pembuatan jurnal untuk setiap transaksi dan para aparatur desa telah menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan baik selama ini. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai komitmen dengan pihak Bendahara desa yakni narasumber 2 ditemukan jawaban yang tidak selaras dengan narasumber 1 selaku Kades yaitu pada pertanyaan mengenai pemahaman siklus akuntansi. Pada pertanyaan “Apakah bapak sebagai aparatur desa sudah memahami siklus

akuntansi dengan baik” narasumber 2 memberi jawaban sebagai berikut:

*“Belum karena saya sudah tua sebagai Bendahara sehingga dalam penggunaan siskeudes juga belum menguasai isinya. Tapi kan disini ada PTL (pembantu teknis) ada kaur kaur yang muda muda yang bisa jadi kerja sama 1 tim jadi saya hanya mengambil uang untuk pos-pos tapi tau saya alur uangnya kemana saya tau, yang jelas saling membantu jadi kerja sama Kades beserta anggotanya disini ada 2 kaur dan 3 kasi kemudian 1 PLT kerja sama setelah itu pokoknya LPJ harus kerja sama untuk menunjang IT nya.”*

Namun pada pertanyaan terkait pemahaman aparatur desa terhadap tugas yang diberikan dan proses penyusunan laporan keuangan, narasumber 2 memberikan jawaban yang hampir sama dengan pihak Kades yaitu bahwa para aparatur desa sudah cukup memahami tugas-tugas yang diberikan dalam dalam setiap transaksi keuangan akan selalu ada pencatatan serta pembukuan atas transaksi tersebut. Kemudian dari hasil wawancara dengan narasumber 3 yang menjabat sebagai pembantu teknis terkait komitmen diketahui pada pertanyaan peneliti mengenai “Apakah bapak sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pemerintah desa?” beliau menjawab “ya karena setiap ganti kepala desa memiliki visi misi, ketika sebagai bawahan pasti ikut dengan apa yang menjadi visi misi pemimpin seperti itu.” Narasumber 3 juga menjawab bahwa selama menjadi aparatur desa beliau tidak berfokus pada pembangunan karir melainkan lebih berusaha untuk memberikan kontribusi ke desa. Narasumber 3 beranggapan bahwa selama memang bisa membantu maka beliau akan berusaha untuk memberikan bantuan karena niatnya memang untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan desa itu saja. Narasumber 3 juga menyampaikan kendala yang dialami selama menjabat sebagai aparatur desa seperti jawabannya sebagai berikut:

*“Kendalanya mungkin kadang kita ada hal hal yang belum paham itu saja, kita selalu berkoordinasi kalau disini dengan sekretaris desa karena yang menguasai administrasi pemimpin pak Kades jadi kita selalu berkoordinasi, mungkin ketika ada kendala lain non teknis yang itu mungkin butuh bantuan teman dari desa lain ya kita komunikasi, bertanya seperti itu.”*

### Kompetensi

Dari hasil wawancara mengenai kompetensi, jawaban narasumber 1 selaku Kades pada pertanyaan “Apakah bapak sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi instansi?” *“iya sesuai dengan visi misi saya sebagai kepala desa”*. Begitu juga narasumber 2 selaku Bendahara juga menjawab bahwa pekerjaan yang dilakukannya sudah mengikuti visi dan misi kepala desa. Namun narasumber 2 juga mengatakan bahwa penilaian sesuai nya pekerjaan dengan visi dan misi desa dilakukan oleh bagian pemeriksaan dari inspektoran dari kecamatan. Dalam wawancara dengan narasumber 2 juga memperoleh informasi yaitu bahwa beliau sudah menjabat sebagai Bendahara selama 30 tahun. Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara yaitu mengurus keuangan dari pak kades dan karena narasumber 2 sudah cukup berumur maka beliau hanya ditugaskan mengurus keuangan saja seperti, mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang.

Kemudian dari hasil wawancara terkait kompetensi dengan narasumber 3 yang menjabat sebagai pembantu teknis beliau mengatakan bahwa beliau sudah cukup memahami dalam hal siklus akuntansi, walaupun masih ada beberapa kekurangan dikarenakan lumayan banyaknya data yang harus disajikan namun narasumber 3 akan berusaha untuk tetap belajar karena zaman yang terus berubah akan turut mengakibatkan adanya perubahan dalam berbagai hal tak terkecuali pada sistem akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau:

*“Menurut saya sudah paham, walaupun masih ada kekurangan karena lumayan banyak yang harus disajikan harus tetap belajar karena jaman sekarang selalu ada perubahan dan harus kita ikuti kalau kita tidak mengikuti perkembangan maka tertindas dengan kemajuan jaman, sementara ini kita bisa berjalan dan mengikuti alur dan sambil belajar dengan hal hal yang baru.*

### Partisipasi Masyarakat

Dari hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat, menurut narasumber 1 selaku Kades mengatakan bahwa kebijakan pemerintah desa sudah sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa, salah contoh kegiatannya adalah seperti gotong royong membantu masyarakat. Narasumber 1 juga mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat desa

sudah mulai memiliki inisiatif sendiri dalam usaha membangun desa. Meskipun dalam terkadang terjadi kendala dalam upaya tersebut namun para anggota akan selalu berusaha untuk mencari solusi bersama demi tercapainya tujuan dan terselesaikannya kegiatan tersebut dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau:

*“Kebijakan desa sudah berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat juga sudah mulai memiliki inisiatif dalam membangun desa.*

### 3.9 Pembahasan

#### Kompetensi dan Akuntabilitas

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$  sehingga hipotesis diterima yang berarti kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Artinya. Nilai koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, sehingga variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa semakin kompeten aparatur dalam mengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa di Desa Truko akan semakin akuntabel dan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang sudah memiliki kompetensi dalam melakukan tugasnya sehingga dapat bertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik. Hasil penelitian Mada *et al*, (2017) mengatakan bahwa kompetensi aparatur merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kepala desa yang menyatakan bahwa selama ini akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik, dengan membuat laporan keuangan secara rutin yakni setiap 1 tahun sekali. Dan bendahara bertugas membuat laporan pertanggung jawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan dengan mencatat setiap anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut implikasi hasil wawancara mendapati jika pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitasnya yang didukung dengan adanya bentuk transparansi berupa

pemasangan MMT atau spanduk yang berkaitan dengan aliran dana masuk dan dana keluar di desa. Tujuan pembuatan MMT atau spanduk di balai desa adalah agar masyarakat desa mengetahui jika dana desa yang diperoleh dari pusat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber daya manusia berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan, sehingga dengan adanya kompetensi aparatur desa mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil uji variabel kompetensi terhadap akuntabilitas dengan nilai signifikansi 0,005 sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para responden yakni Kades, Bendahara dan pembantu teknis dapat disimpulkan bahwa dalam hal kompetensi setiap aparatur desa telah cukup memahami uraian tugas yang harus dikerjakan dengan tingkat pemahaman sekitar 80% sesuai bagian dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun rata-rata pendidikan akhir para aparatur daerah hanya menempuh sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) namun berkat adanya pelatihan yang rutin dilakukan oleh pemerintah desa yang diadakan oleh PEMDA berdasarkan usulan pemerintah desa menjadikan para aparatur yang bertugas memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik dalam menyelesaikan kewajiban serta tanggung jawabnya. Tingkat kompetensi aparatur desa inipun menunjukkan adanya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai yang dikatakan oleh Kades bahwa seluruh pekerjaan termasuk bagian pengelolaan yang telah dibagi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Seluruh transaksi keuangan pun selalu dicatat dalam pembukuan dan diinput secara online SISKEUDES. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Aulia, (2018) dan Widyatama *et al*, (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Komitmen dan Akuntabilitas**

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana

desa. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  sehingga hipotesis diterima yang berarti komitmen berpengaruh terhadap akuntabilitas. Dan, nilai koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, sehingga variabel komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Artinya, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki pemerintah desa akan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi, sehingga pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hasil signifikansi sebesar 0,001 ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh bendahara yang menyatakan bahwa pengalaman menjabat selama 30 tahun yang diemban narasumber 2 menjadi bukti jika latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi komitmen seseorang untuk berdedikasi mengelola keuangan desa yang terbilang rumit. Dalam kurun waktu 30 tahun tentu bendahara telah mampu mengemban tugasnya dengan baik berbekal pengalaman untuk mengambil keputusan sehubungan dengan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran dana desa dan pembuatan laporan keuangan. Pengalaman menjadi faktor utama dari adanya akuntabilitas yang dipelopori oleh komitmen organisasi.

Suherwan dan Kamaliah, (2017), Raharjo *et al*, (2017), Sarah *et al*, (2020) menyatakan jika komitmen organisasi tergolong sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Akuntabilitas dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi memiliki rasa kepuasan dan keterlibatan dalam bekerja untuk mencapai tujuan di organisasi. Kemudian penelitian Nurdin dan Wijaya, (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang yang mengidentifikasikan keterlibatannya dalam satu bagian organisasi. Komitmen organisasi dibangun atas kepercayaan pekerjaan atas nilai-nilai organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Semakin komitmen anggota organisasi, maka anggota organisasi akan semakin baik dalam melakukan pelayanan dan administrasi desa.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para responden yakni Kades, Bendahara dan pembantu teknis dapat disimpulkan bahwa

dalam hal komitmen, para aparatur desa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pemerintah desa. Bendahara desa juga menyebutkan bahwa rata - rata aparatur desa telah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun termasuk dirinya yang telah menjadi Bendahara desa selama 30 tahun. Selain itu pihak Bendahara juga menyebutkan bahwa dirinya selalu berusaha memberikan kontribusi yang terbaik dengan harapan untuk dapat memberikan kemajuan pada desa. Hal ini menunjukkan para aparatur desa telah memiliki komitmen yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al*, (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Partisipasi dan Akuntabilitas**

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$  sehingga hipotesis diterima yang berarti partisipasi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Besaran nilai koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, sehingga variabel partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa semakin aktif partisipasi dari masyarakat dalam mengelola desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa. Pentingnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa sangat diperlukan, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan menjadi solid dan bertanggung jawab sehingga, dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan tujuan awal yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku pemerintah desa. Perolehan nilai signifikansi dalam penelitian didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah desa sudah sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa, salah contoh kegiatannya adalah seperti gotong royong membantu masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan musrenbang yang diselenggarakan pemerintah desa sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan yakni seminggu

sekali setiap hari senin. Implikasi dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan setidaknya memberikan gambaran jika masyarakat desa turut serta dalam mengawal adanya lalu lintas dana desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para responden yakni Kades, Bendahara dan pembantu teknis dapat dilihat bahwa dalam hal partisipasi masyarakat, kebijakan desa sudah berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu pihak Kades juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat sendiri sudah mulai memiliki inisiatif dalam membangun desa. Partisipasi ini pun berkaitan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pengelolaan dana desa ini telah dijalankan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat dengan cara melakukan publikasi di APBDES dalam bentuk baliho ataupun spanduk. Pihak Kades pun mengungkapkan dalam menentukan anggaran yang dilakukan setiap tahunnya selalu melalui musyawarah terlebih dahulu dengan warga dan pihak berkepentingan lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al*, (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **5. KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini telah menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas dana desa. Dari hasil penelitian dapat ditarik tiga kesimpulan yakni kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa serta partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Desa Truko, Kecamatan Bringin.

### **4.2 Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini belum sepenuhnya dapat digeneralisasi terhadap desa sekitar yang berada

di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, karena penelitian ini hanya memfokuskan objek pada Desa Truko dan hanya menarik kesimpulan dari Desa Truko saja. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi pemerintah desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan masih banyak variabel lain yang perlu ditinjau kembali untuk melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3 Saran**

Perlu dilakukan pendampingan secara efektif dan efisien oleh pendamping desa, inspektorat, dan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD teknis yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Semarang terhadap pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Selain itu, perlu adanya aparat yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa serta menjaga kompetensi dan komitmen pemerintah desa serta partisipasi masyarakat desa. Diharapkan Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa akan pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengelolaan dana desa. Selanjutnya saran untuk penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas seperti sistem pengendalian internal.

#### **6. REFERENSI**

Agustiningsih, M., Taufik, T., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91.

Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus desa di kecamatan tarub Kabupaten

tegal). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>

Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.

Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *Jom Feb*, 1(1), 1–15.

Cahyani, N. M. M., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei pada desa-desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung). *Jurnal Akuntansi*, 1(6), 16–31.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi 3). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Daulay, D. rizki A. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris di desa tambusai timur, suka maju dan lubu. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*, 3(1), 38.
- Dewi, C. K., Ikkal, M., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fitriana, D. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Airlangga*, 3(1), 1–17.
- Gagali, Y. R. (2019). Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa, kompetensi dan peran internal audit terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 3(2), 144–156.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 3–7.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kartika, R. (2012). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan tanggung jawab terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Khasanah, R. N. (2020). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan tanggung jawab terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasakti*, 5–24.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Latif, A., Rusdi, I. M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Siderang Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 3.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic*,

- Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Murcia, J. C., & Sanchez, K. E. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 85(1), 2071–2079.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 79–85. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>
- Mustanir, A., Dema, H., Syarifuddin, H., Irwan, & Wulandari, K. M. S. (2018). Pengaruh motivasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di kelurahan lelelaba kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rapping. *Ilmiah Clean Government*, 2(1), 27–39.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1), 1–10.
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, 53(9), 1689–1699.
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 400–411.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Purba, D. O. (2017). *Pemerintah Jawa Tengah Tekan Potensi Penyimpangan Dana Desa*. 3 Oktober. [tpps://regional.kompas.com/](https://regional.kompas.com/)
- Raharjo, N. D., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2017). Pengaruh Moderasi Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Niko Dwi Raharjo, Taufeni Taufik & Vince Ratnawati). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 159–173.
- Rismawati, T. (2019). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa di Kecamat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, 4(2), 66.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Sari, S. P., Kartika, & Prasetyo, W. (2020). Pengaruh fraud diamond bagi kecurangan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 41–50.
- Setyowati, D. N. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, 4(3).

- Suherwan, & Kamaliah. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi alokasi dana desa: Studi kasus di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(2), 201–214.  
<https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Tarjo. (2019). Pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan Koto Kabupaten Tebo). *Jurnal Tata Sejuta*, 5(2).
- Wafirotin, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). the Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31.  
<https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i1.1527>
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148.  
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>

Lampiran 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 9. Hasil Uji Validitas

Variabel	Person correlation	Significant (2-tailed)	R Tabel	Explanation
Kompetensi (X1)				
X1.1	0,809	0,000	0,279	Valid
X1.2	0,859	0,000		Valid
X1.3	0,830	0,000		Valid
X1.4	0,923	0,000		Valid
X1.5	0,891	0,000		Valid
X1.6	0,744	0,000		Valid
Komitmen (X2)				
X2.1	0,875	0,000	0,279	Valid
X2.2	0,758	0,000		Valid
X2.3	0,793	0,000		Valid
X2.4	0,854	0,000		Valid
X2.5	0,839	0,000		Valid
X2.6	0,805	0,000		Valid
Partisipasi (X3)				
X3.1	0,814	0,000	0,279	Valid
X3.2	0,945	0,000		Valid
X3.3	0,899	0,000		Valid
X3.4	0,926	0,000		Valid
X3.5	0,854	0,000		Valid
X3.6	0,864	0,000		Valid
Akuntabilitas (Y)				
Y1.1	0,928	0,000	0,279	Valid
Y1.2	0,882	0,000		Valid
Y1.3	0,916	0,000		Valid
Y1.4	0,925	0,000		Valid
Y1.5	0,855	0,000		Valid
Y1.6	0,779	0,000		Valid

Sumber: Data Primer (2022)

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Reliabilitas (Cronbach Alpha)	Dasar Nilai Cronbach Alpha	Jumlah Item Pertanyaan	Keputusan
Kompetensi	0,912	0,600	6	Reliabel
Komitmen	0,900	0,600	6	Reliabel
Partisipasi	0,944	0,600	6	Reliabel
Akuntabilitas	0,940	0,600	6	Reliabel

Sumber: Data Primer (2022)